



NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI BINTAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN

2018

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2019**



NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Bintan Buyu, Maret 2019

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan;
- Yth. Saudara Wakil Bupati Bintan;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan serta Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Kepala Fasharkan Mentigi Tanjung Uban, Komandan Satuan Radar 213 Sri Bintan;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah
- Yth. Kepala OPD Se Kabupaten Bintan;
- Yth. Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan LSM, serta insan pers dan undangan yang kami cintai.

Hadirin undangan yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Nota Pengantar ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran **Allah SWT**, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Bintan yang sama-sama kita cintai.

Melalui forum yang terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten

Bintan, pimpinan partai politik dan seluruh jajaran aparatur birokrasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan keberhasilan berbagai capaian agenda pembangunan daerah yang telah menjadi konsensus bersama sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap komponen masyarakat Kabupaten Bintan, yang telah menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai harapan kita bersama. Kondisi ini tentu saja harus kita syukuri dan pertahankan serta perlu ditingkatkan. Saya sungguh menaruh perhatian, harapan dan keyakinan yang tinggi apabila sikap tersebut mampu kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pada bulan April tahun 2019 ini kita akan melaksanakan sebuah agenda penting yaitu akan diselenggarakan pesta demokrasi dalam rangka keberlangsungan pemerintah Republik Indonesia yang tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan. Saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Bintan agar memelihara suasana yang kondusif guna suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi yang hasilnya akan memilih anggota legislatif dan eksekutif di pusat maupun daerah yang akan mengawal pembangunan disegala bidang, **Insha Allah** semua program pembangunan daerah akan bisa terlaksana dengan baik dan Kabupaten Bintan bisa meraih kegemilangannya dimasa mendatang.

Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Tahun 2018 merupakan **Tahun Ketiga Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2016**, berkaitan dengan substansi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018,

penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan **LKPJ Tahun Ketiga** dalam masa **RPJMD periode tahun 2016-2021**. Secara struktur APBD tahun 2018 disusun berdasarkan RKPD tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD periode tahun 2016-2021, demikian pula target kinerjanya diukur berdasarkan RPJMD periode tahun 2016-2021.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian, semangat dan makna penyampaian LKPJ ini memiliki kesamaan yakni dalam kerangka memperkuat keseimbangan peran **(check and ballances)** diantara elemen penyelenggara Pemerintahan Daerah, terutama antara DPRD dan Perangkat Daerah.

Ini juga mencermati klausul pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang mekanisme pembahasan LKPJ yang memerlukan **pembahasan secara internal** oleh DPRD, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan Pemerintahan Daerah. Kiranya hal tersebut akan menjadi sebuah wahana bagi peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. **Alhamdulillah** dokumen LKPJ ini dapat kami susun, yang selengkapnyanya akan saya serahkan setelah penyampaian pengantar ini.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan Pemerintahan Daerah, telah dilakukan interpretasi atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah baik untuk kurun lima tahunan maupun rencana kerja tahunannya. Dengan demikian, pemaknaan kinerja Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 tidak akan terlepas dari dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, Kebijakan Umum Anggaran serta strategi dan prioritas APBD Kabupaten Bintan tahun 2018 yaitu : (1) Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama Dibidang

Pariwisata Dan Kelautan; (2) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dan Keterhubungan Antar Wilayah Dan Antar Pulau Untuk Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata; (3) Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan; (4) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi Dengan Pelayanan Yang Terjangkau Dan Berkualitas; (5) Melestarikan Nilai-Nilai Dan Seni Budaya Melayu; (6) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa; (7) Meningkatkan Peran Generasi Muda Dan Prestasi Olah Raga; (8) Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia,

Dalam forum yang terhormat ini, perkenalkan saya beserta **Wakil Bupati** untuk menyampaikan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dicapai sepanjang tahun 2018, baik berupa keberhasilan maupun permasalahannya yang memerlukan perhatian semua pihak yang akan saya awali dari gambaran realisasi APBD tahun 2018.

Walaupun informasi realisasi APBD ini bersifat tentatif karena perlu dilakukan audit atas laporan keuangan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** yang hingga saat ini masih berlangsung. Insha Allah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahun 2018 akan disampaikan secara tersendiri setelah audit BPK tuntas sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya, penyampaian LKPJ tahun 2018, merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2018 yang Insha Allah akan ditindak lanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahun 2018.

1. **Pendapatan Daerah** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 1,01 triliun rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 1,10 triliun rupiah lebih atau sebesar 109,44 persen. Capaian pendapatan daerah tahun 2018 melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 95,50 milyar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut :
 - **Pendapatan Asli Daerah** ditargetkan sebesar 240,55 milyar rupiah lebih, terealisasi sebesar 265,02 milyar rupiah lebih atau sebesar 110,17 persen. Berdasarkan dari sumber **Pendapatan Asli Daerah** hampir seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan, dari penerimaan **Pajak Daerah** sebesar 108,11 persen, penerimaan **Retribusi Daerah** terealisasi sebesar 120,50 persen, **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** sebesar 100 persen dan, **Lain-lain PAD yang sah** sebesar 129,10 persen.
 - Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari **Dana Perimbangan** dapat direalisasikan sebesar 712,75 milyar rupiah lebih atau 105,63 persen, meningkat dari target yang ditetapkan sebesar 86,54 milyar rupiah lebih, terdiri dari **Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak** sebesar 140,25 milyar rupiah lebih, **Dana Alokasi Umum** sebesar 484,58 milyar rupiah lebih dan **Dana Alokasi Khusus** sebesar 115,57 milyar rupiah lebih.
 - Sedangkan untuk pendapatan daerah yang bersumber dari **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** terealisasi sebesar 101,41 milyar rupiah lebih.
2. **Belanja Daerah**, terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** dan **Belanja Langsung**. Belanja Daerah pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar 1,18 triliun rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 1,06 triliun rupiah lebih atau mencapai sebesar 90,06 persen. Dengan rincian sebagai berikut : **Belanja Tidak Langsung** dialokasikan sebesar 528,76 milyar rupiah lebih dengan realisasi mencapai 488,59 milyar rupiah

lebih atau 92,40 persen terdiri dari :

- **Belanja Pegawai** dialokasikan sebesar 417,12 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 383,15 milyar rupiah lebih atau 91,86 persen;
- **Belanja Hibah** dialokasikan sebesar 11,20 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 10,67 milyar rupiah lebih atau 95,28 persen;
- **Belanja Bantuan Sosial** dialokasikan sebesar 11,40 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 7,20 milyar rupiah lebih atau 63,16 persen;
- **Belanja Bantuan Keuangan** dialokasikan sebesar 88,02 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 87,55 milyar rupiah lebih atau 99,46 persen dan **Belanja Tidak Terduga** dialokasikan sebesar 1 milyar rupiah tetapi tidak direalisasikan.

Sementara itu untuk **Belanja Langsung** dialokasikan sebesar 656,72 milyar rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 579 milyar rupiah lebih atau mencapai 88,17 persen, terdiri dari **Belanja Pegawai** yang dialokasikan sebesar 111,55 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 91,24 milyar rupiah lebih atau 81,79 persen; **Belanja Barang dan Jasa** dialokasikan sebesar 323,26 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 285,02 milyar rupiah lebih atau 88,17 persen; **Belanja Modal** dialokasikan sebesar 221,89 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 202,74 milyar rupiah lebih atau 91,37 persen.

3. **Pembiayaan Daerah** meliputi **Penerimaan Pembiayaan** yang terdiri dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)** dengan anggaran sebesar 176,14 milyar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 176,14 milyar rupiah lebih atau 100 persen, ditambah dengan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 5 juta rupiah; sedangkan **Pengeluaran Pembiayaan** terdiri dari **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah** dengan

anggaran 2 Milyar Rupiah dan realisasi sebesar 2 Milyar Rupiah atau 100 persen, sehingga **Total Pembiayaan Netto** adalah sebesar 174,143 milyar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 174,148 milyar rupiah lebih atau 100 persen lebih.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Bintan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bintan sebesar **157.927** jiwa dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** sebesar **1,23 persen**. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui pembangunan dibidang Pendidikan, Kesehatan serta percepatan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan formulasi baru dalam perhitungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, IPM pada tahun 2018 diestimasi sebesar 73,29 poin meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 72,91 poin. Sedangkan **Pendapatan Riil Perkapita** diestimasi mencapai 13,92 Juta Rupiah lebih. Seiring dengan dinamika dan tantangan ekonomi pada skala regional, nasional maupun global, capaian pembangunan dibidang ekonomi pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan **Laju Pertumbuhan Ekonomi** yang diestimasi sebesar **5,36 persen** lebih tinggi dari tahun 2017 yang tercatat sebesar **5,01 persen**; Untuk **Laju Inflasi** sepanjang 2018 dapat dikendalikan sebesar 2,36 persen; sementara itu **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)** diestimasi mencapai **14 triliun** rupiah lebih meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 13 triliun rupiah lebih.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan secara berkesinambungan, dibutuhkan kerja keras serta sinergitas yang kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam hal menurunkan **Indeks Gini**, menurunkan tingkat kemiskinan serta

perluasan kesempatan kerja untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2016-2021 kami akan menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis misi dan urusan Pemerintahan, sebagai berikut :

Misi Pertama, Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan,

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka program dan pembangunan diformulasikan berdasarkan beberapa urusan bidang yang diimplementasikan ke dalam Urusan Penanaman Modal, Penataan Ruang, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran (1) Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan, (2) Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang (3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara (4) Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD (5) Meningkatnya jumlah produksi perikanan dan (6) Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan **Urusan Penanaman Modal**, untuk mendukung Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi telah dioptimalkan sistem **One Stop Service** yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Pada tahun 2018 realisasi **Investasi** yang berasal dari **Penanaman Modal Asing (PMA)** mencapai 696,86 juta US dolar lebih dan realisasi **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** sebesar 462,65 milyar rupiah lebih. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Bintan, promosi investasi di dalam negeri dalam bentuk pameran / ekspo, optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan

Kabupaten Bintan juga dilakukan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu yang terkait penerbitan ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2018, telah diproses sebanyak 1.062 izin investasi dan 222 izin non investasi.

Dalam upaya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi untuk mendukung kualitas maupun pemasaran hasil kerajinan rakyat di Kabupaten Bintan telah dilaksanakan optimasi peran DEKRANASDA Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kualitas dan distribusi kerajinan melalui Pameran (expo), Perlombaan dan Rakernas Dekranasda.

Untuk mewujudkan struktur dan Pola Tata Ruang yang serasi, lestari dan optimal serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya khususnya dalam penyelarasan kebijakan **Urusan Penataan Ruang** di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah sedang melakukan proses revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2018 ini Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang telah mencapai 78 persen.

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang sangat strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Promosi pariwisata terus ditingkatkan dengan melaksanakan even-even Tahunan berskala Nasional maupun Internasional seperti **Tour De Bintan, Ironman Bintan, Bintan Triathlon, Festival Jong Bintan, Eco Run Mapur Island dan Sail Bintan**. Dalam penanganan urusan kepariwisataan telah menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat signifikan ke Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2018 jumlah total kunjungan ke Kabupaten Bintan tercatat sebesar 1.063.458 wisatawan yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 642.709 orang dan wisatawan nusantara ataupun domestik sebesar 420.749 orang.

Keberhasilan pembangunan bidang pariwisata ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan sekaligus antara lain **Juara Dua Tingkat Nasional Objek Wisata Terpopuler dalam ajang Pesona Indonesia 2018 dari Kementerian Pariwisata RI** dan **Penganugerahan Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) Tahun 2018** dari **City Asia Center for Smart Nation (CCSN)** Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Hadirin yang Berbahagia,

Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan teknis, fasilitasi, dan akses pengusaha kecil dan usaha menengah koperasi pada lembaga keuangan dan perbankan. Keberhasilan pembangunan Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, program peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil menengah serta program peningkatan daya saing usaha bagi koperasi dan usaha mikro untuk mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Untuk melaksanakan program tersebut telah dilaksanakan kegiatan bantuan pengadaan peralatan dan perlengkapan bagi usaha mikro berupa bantuan peralatan dan mesin bagi 3 kelompok usaha ekonomi produktif (PLUT); Dukungan operasional pusat pelayanan usaha terpadu berupa penyediaan peralatan kantor dan pendukungnya untuk gedung PLUT di Kecamatan Gunung Kijang. Peningkatan kualitas dan kemampuan pengelola/ pengurus koperasi melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi yang melibatkan 30 pengurus koperasi dari seluruh kecamatan, sehingga meningkatnya persentase koperasi aktif saat ini mencapai 58 persen atau 132 unit. Dengan penambahan jumlah pengurusnya yang terlatih mencapai 300 orang. Sedangkan tenaga kerja yang terserap pada

sektor UMKM terus meningkat dimana pada tahun 2018 ini mencapai 11.489 orang.

Hadirin yang Berbahagia,

Untuk **Urusan Perikanan**, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan berupa pemberian asuransi nelayan kepada 573 orang serta penyaluran BBM untuk nelayan dengan total 11,9 juta liter. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha perikanan sehingga meningkatnya kelompok nelayan aktif yang mencapai 60 persen dan kelompok pembudidaya ikan sebanyak 65 persen. Untuk meningkatkan kapasitas pengembangan perikanan tangkap telah dilakukan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil melalui penyediaan 5 jenis kapal penangkap ikan sebanyak 16 unit, 9 jenis alat tangkap dan 2 jenis sarana pendukung penangkapan ikan. Penyediaan 13 unit kapal penangkap ikan fiber 1 GT dan alat tangkapnya. Pada tahun 2018 diperoleh capaian kinerja bidang perikanan, produksi perikanan mencapai 56 ribu ton lebih yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 54 ribu ton lebih dan produksi perikanan budidaya sebesar 1.400 ton lebih. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pekerjaan lanjutan rencana pembangunan pelabuhan perikanan seluas lebih kurang 4 hektar yang berlokasi di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur. Yakni penyusunan AMDAL dan *Detail Engineering Design* sebagai kelengkapan dokumen pelaksanaan fisik pembangunan pelabuhan.

Hasil sektor perikanan berupa makanan laut atau boga bahari, sejak dari dulu dikenal dan dikonsumsi masyarakat karena menjadi sumber gizi, vitamin maupun mineral khususnya untuk anak-anak dan balita di masa pertumbuhan. Untuk mendukung pemerintah mensukseskan program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, Pemerintah Kabupaten Bintan menggalakkan program menu masakan serba ikan. Pada tahun 2018 telah mendapatkan penghargaan **Juara Dua Nasional Pada Lomba Masak Menu Serba Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.**

Urusan Perindustrian ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penumbuhan berbagai jenis industri khususnya industri kecil dan menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah dengan melaksanakan kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan bagi 5 kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Bintan, Promosi dan Partisipasi Pameran Produk IKM Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Kijang diikuti sebanyak 20 peserta dengan 30 produk unggulan IKM di Kabupaten Bintan, sementara itu Pameran di Kota Batam diikuti peserta dari 5 propinsi dan 6 Kabupaten/Kota; peningkatan kinerja dalam urusan perindustrian ini dapat di lihat dengan meningkatnya jumlah IKM sebesar 2,6 persen. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 469 unit IKM dengan nilai investasi mencapai 1,99 milyar rupiah lebih. IKM ini diarahkan untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar sehingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 909 orang.

Dalam penyelenggaraan **Urusan Perdagangan**, telah dilakukan upaya langkah-langkah pengamanan sediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui pelaksanaan program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Salah satu kegiatan strategis dalam rangka menjamin kualitas barang yang diperdagangkan di Kabupaten Bintan adalah pelaksanaan monitoring dan pengawasan Harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di 9 Kecamatan; Kegiatan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan terhadap Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya yang telah dilakukan kepada 554 unit Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga memperoleh manfaat retribusi Tera yang terus meningkat. Dilain pihak dalam rangka menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang biasa terjadi menjelang bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri telah dilaksanakan Operasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat secara serentak di 10 Kecamatan. Adapun jumlah paket yang di bagikan sebanyak 4.500 Paket dengan harga 64 ribu rupiah per paket dengan

rincian untuk Kecamatan Bintan Utara 755 paket, Bintan Timur 1.600 paket, Gunung Kijang 695 paket, Toapaya 200 paket, Seri Kuala Lobam 450 paket, Teluk Sebong 250 paket, Teluk Bintan 150 paket, Bintan Pesisir 200 paket dan Kecamatan Mantang 200 paket, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Sementara itu dalam rangka Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan juga mendapatkan bantuan APBN sebesar 950 juta rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam bentuk Pembangunan Pasar 1 unit di Desa Toapaya Selatan.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Kedua, yaitu **Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata** yang diimplementasikan ke dalam urusan Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Urusan Pemerintahan, dengan sasaran (1) Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) antar pulau, (2) Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi, (3) Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum, (4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan, (5) Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan dan (6) Meratanya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.

Untuk penyelenggaraan **Urusan Perhubungan**, telah dilaksanakan peningkatan pelayanan angkutan bidang transportasi laut, melalui peningkatan pelayanan kepelabuhanan untuk 5 dermaga, bantuan operasional transportasi laut sehingga tersedianya angkutan laut (kapal cepat) bagi masyarakat yang akan ke Kecamatan Tambelan sempena libur Ramadhan dan perayaan hari raya idul fitri sebanyak 4 trip, Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 2.200 unit kendaraan,

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yaitu satu unit dermaga rakyat di Kecamatan Bintan Timur, Pembangunan Pagar Dermaga Tanjung Keramat di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan serta rehabilitasi dermaga dan ruang tunggu Kampung Mantang Lama di Kecamatan Mantang sehingga terpeliharanya dermaga atau pelabuhan rakyat yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mobilitas orang maupun barang.

Disamping itu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kenyamanan berkendara, pada tahun 2018 telah dilaksanakan peningkatan dan pengamanan lalu lintas angkutan melalui pembuatan marka jalan sepanjang 6.500 meter dan pita penghaduh sepanjang 150 meter, rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta fasilitas perhubungan yang tersebar di sepanjang jalan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan penataan manajemen lalu lintas dan angkutan antar kecamatan di Kabupaten Bintan.

Pada **Urusan Pekerjaan Umum**, di bidang infrastruktur jalan, pada tahun 2018 telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah terealisasi jalan sepanjang lebih kurang 15 Kilometer, sehingga sampai dengan tahun 2018 panjang jalan yang telah dibangun sepanjang lebih kurang 62 Kilometer.

Infrastruktur air bersih juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu melalui pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Bintan. Pada tahun 2018 telah ditingkatkan, dioptimalisasi dan dikembangkan 7 unit SPAM IKK yang terdiri dari 1 unit SPAM IKK Perkotaan dengan akses mencapai 2.639 sambungan rumah di kecamatan Gunung Kijang dan 6 unit SPAM IKK Perdesaan dengan akses sebanyak 1.831 sambungan rumah di kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir, Toapaya, Teluk Bintan dan Bintan Timur.

Kebijakan pembangunan dalam **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** ditujukan untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, penyediaan tempat pembuangan sampah, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemakaman umum dan lampu jalan. Upaya yang telah dilakukan antara lain Pembebasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bintan Utara, Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Sosial, Pembangunan Jalan Semenisi/Paving Block dan Buras, Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah, Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu, Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum melalui pengadaan serta pemeliharaan lampu-lampu jalan yang tersebar di tempat yang strategis serta Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk meningkatkan kapasitas pengembangan kinerja air minum dan air limbah telah dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal di Kecamatan Bintan Timur dengan bantuan dana APBN.

Berkenaan dengan penanganan persampahan telah dilaksanakan program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, pelaksanaan program **Bank Sampah**, jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan telah mencapai 27 kelompok. Upaya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ternyata telah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, disamping itu Pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan pembinaan terhadap kelompok yang ada maupun membentuk kelompok baru hingga ditingkat kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan promosi **Gerakan Bintan Bersih**. Dalam hal penanganan sampah hingga tahun 2018 telah dibangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebanyak 130 unit dan tersedia armada pengangkut sampah serta sarana pendukung lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan. Upaya tersebut telah meningkatkan persentase penanganan sampah hingga mencapai 91 persen lebih pada tahun 2018.

Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya serta komitmen Pemerintah Daerah untuk terus membina sehingga mampu menggabungkan unsur sosial, lingkungan pendidikan dengan lingkungan sekitar untuk membentuk kota yang layak huni. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya kembali **Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Kecil dan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk Sekolah Dasar Negeri 001 Seri Kuala Lobam melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.**

Untuk kenyamanan serta keindahan lingkungan sekitar pemukiman, hingga tahun 2018 pemerintah daerah telah membangun fasilitas penerangan Lampu Jalan sebanyak 3.003 unit lampu jalan yang tersebar di 9 kecamatan dan 195 Unit Lampu Solar Cell.

Sementara itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bintan, khususnya di wilayah perbatasan, pemerintah telah melakukan upaya melalui Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan dengan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan, serta Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati yang diimplementasikan ke dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan sasaran (1) Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah, (2) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah, (3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Pemerintah Daerah, (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (5) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (6) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, (7) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum dan (8) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan wawasan kebangsaan.

Dalam Pelaksanaan **Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, upaya memantapkan kinerja Pemerintah Daerah tidak terlepas dari efektifitas pendayagunaan sumber daya aparatur yang tersedia dilingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu berbagai upaya pengembangan kompetensi kedinasan, pemberian insentif pegawai, penegasan disiplin dan pengelolaan pembinaan karier PNS merupakan fokus pendayagunaan kinerja yang terus diperbaiki baik metode maupun daya capaiannya. Dalam rangka Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan fungsional umum sebagai dasar penentuan *Job Grading* dalam pemberian **Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP)** berbasis kinerja serta Penataan OPD Kabupaten Bintan melalui penambahan dua Dinas teknis yaitu Dinas Kominfo dan Dinas Tenaga Kerja.

Pada tahun 2018 ditunjukkan dengan terus meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja persentase bidang pelayanan dasar yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen.

Pada aspek penyelenggaraan administrasi bidang keuangan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk tujuh kali berturut-turut, sebagai capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk aspek kepegawaian, dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Pemerintahan, pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan pengembangan aparatur baik melalui pembinaan tugas belajar dan ikatan dinas, serta pelaksanaan Uji Kompetensi untuk sebanyak 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping itu untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparatur dalam Pelayanan Publik telah dilaksanakan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI kepada 38 orang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah dengan mengadakan seleksi peserta CPNS yang diikuti 1.940 peminat.

Berkaitan dengan **pengawasan** kinerja Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya semakin diarahkan pada perbaikan citra dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang kian bersih dan terhindar dari **mal-praktek** penyelenggaraan Pemerintahan. Upaya kearah tersebut, telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain audit komprehensif dan pemeriksaan reguler serta pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan internal secara berkala. Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas pembangunan daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pembertasan Korupsi. Salah satu rencana aksi yang konisten dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai bagian dari strategi **Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** adalah **Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Publik Pemerintah**. Sampai dengan tahun 2018 melalui penerapan *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penghematan APBD sebesar **12,70 milyar lebih**.

Kemudian untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal; Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan kembali meraih **Predikat Baik** atas **Laporan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 yang secara langsung diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu untuk penyelenggaraan pemerintah yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah mendapatkan **Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** dengan menduduki rangking 19 dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia.

Bersama saudara **Wakil Bupati**, saya akan terus berupaya mencermati serta mengambil langkah-langkah perbaikan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maupun mempertajam pembinaan dan pengawasan anggaran terhadap seluruh organisasi perangkat daerah. Hal demikian, kiranya merupakan agenda besar yang akan dilakukan sejalan dengan upaya yang tengah ditegakkan oleh **Presiden Republik Indonesia** melalui percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selanjutnya **Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan**, diawali dengan kondisi sinergitas antar organisasi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (**MUSRENBANG**), proses penyusunan anggaran hingga pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD yang keseluruhannya makin diarahkan pada keterpaduan peran dan kebutuhan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Upaya membangun sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan pula melalui penyelenggaraan **Forum OPD** yang dilaksanakan setiap tahunnya. Agenda utama forum tersebut berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan aktual maupun isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kewajiban dan hak otonomi yang diberikan Pemerintah kepada daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah serta membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara maupun *stake holder* pemerintah daerah, Kabupaten Bintan telah melakukan inovasi pengembangan aplikasi **e-gov** yang mencakup : **e-planning**, **e-budgeting** dan **simonev**, fasilitasi integrasi data **SIPD**, Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembuatan Peta Dasar dan Peta Tematik Kabupaten Bintan; Pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Bintan; Program perencanaan daerah bawahan dengan kegiatan sinkronisasi dokumen perencanaan desa, pendataan analisis potensi desa dan kelurahan. Selanjutnya untuk program perencanaan sosial budaya telah dilaksanakan Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bintan, Pelaksanaan **Sustainable Development's Goals (SDG's)**, Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD); Penyusunan Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pelaksanaan **Program Kabupaten Sehat**, Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja bidang kelitbangan telah dilakukan penyelenggaraan Rapat Koordinasi teknis penelitian dan pengembangan yang diikuti oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Penelitian Dampak Pemberian Bantuan Terhadap Pendapatan Nelayan/Pembudidaya, Kajian strategis optimalisasi produk-produk UMKM dan Kajian Strategi Pengembangan Kepariwisata Maritim Berbasis Masyarakat yang diharapkan dapat melahirkan inovasi baru.

Selanjutnya pada bidang **penegakan hukum** dan **hak asasi manusia** di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah telah dilakukan penetapan berbagai peraturan daerah sebagai instrumen penegakan hukum melalui pelaksanaan program **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**. Pada tahun 2018 telah berhasil ditetapkan sebanyak 9 Peraturan Daerah, disamping itu telah dilakukan publikasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan daerah serta litigasi dan non litigasi.

Capaian kinerja untuk bidang ini ditunjukkan dengan diraihnya kembali penghargaan skala nasional dari **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)** dalam bentuk **Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018**.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui implementasi **Sistem Administrasi Kependudukan** yang mengintegrasikan pengolahan data dari 10 kecamatan dan satu rumah sakit umum daerah ke jaringan di Kementerian Dalam Negeri sehingga terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan didukung dengan administrasi sistem aplikasi barcode yang akurat dan valid untuk masyarakat Bintan. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan perekaman **e-KTP** mencapai 102.970 atau 96 persen lebih dari penduduk yang wajib ber-KTP seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan yang mencapai 1 persen. Pemerintah Daerah juga terus melakukan sosialisasi dan himbauan agar penduduk yang telah memasuki usia wajib KTP untuk proaktif melakukan perekaman. Sementara itu kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen pencatatan sipil juga terus meningkat. Pada tahun 2018 kepemilikan akte kelahiran mencapai 44.683 jiwa atau sebesar 85 persen dari wajib kepemilikan akte. Demikian pula untuk Akta Perkawinan Non Muslim maupun Akta Kematian. Pada tahun 2018 juga Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 900 Juta rupiah lebih untuk Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu.

Berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan maupun meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus menghimbau melalui media elektronik dan juga melaksanakan program pengembangan perpustakaan sehingga jumlah perpustakaan yang tersebar di kecamatan hingga tahun 2018 mencapai 199 taman bacaan. Demikian pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang terus meningkat pada tahun 2017 tercatat hanya 16.777 pemustaka meningkat

secara signifikan sebesar 56 persen menjadi 26.295 pemustaka. Sementara itu jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah telah mencapai 11.454 judul. Selain itu, Pemerintah Daerah juga melaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan Promosi Minat Baca, Lomba Minat Baca dan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan minat baca bagi generasi muda.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik yang dinamis serta menumbuhkan kebanggaan wawasan kebangsaan dan mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang harmonis telah dilaksanakan Program Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan yang melibatkan 150 Aparatur Sipil Negara, Pembentukan dan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang beranggotakan Tokoh Masyarakat lintas etnis dan agama, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Masyarakat, Koordinasi **Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)**.

Peserta Rapat Paripurna DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Misi Keempat, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global, yang diimplementasikan ke dalam Urusan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran (1) Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket), (3) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan serta ketersediaan obat dan alat kesehatan, (5) Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin serta pemberdayaan dan promosi

kesehatan kepada masyarakat, (6) Terkendalnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera, (7) Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan (8) Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Dalam **Urusan Pendidikan**, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD. Tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan Bidang Pendidikan baik yang menggunakan Anggaran APBD maupun **Dana Alokasi Khusus (DAK)** yang dialokasikan untuk rehabilitasi serta Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar dilengkapi dengan fasilitas pendukung belajar mengajar sebanyak 13 unit Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar sebanyak 34 unit dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 7 unit serta pengadaan dan perlengkapan meubiler; pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional **BOSNAS-SD/MI/SDLB** kepada 17.959 siswa di 96 SD Negeri dan Swasta, dengan perhitungan persiswa mendapatkan 800 ribu rupiah. Sedangkan **BOSNAS-SMP/MTs** diberikan kepada 6.969 siswa untuk 28 SMP Negeri masing-masing siswa memperoleh 1 juta rupiah, sehingga untuk Tahun 2018 BOS dari Pemerintah Pusat diberikan kepada pendidikan dasar jenjang SD sebesar 13,57 milyar rupiah lebih, dan SMP sebesar 6,95 milyar rupiah lebih.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidik, antara lain telah dilaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pembekalan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ) bagi peserta Sertifikasi Guru untuk 100 orang Tenaga Pengajar; pemilihan Pendidik Tenaga Kependidikan berprestasi tingkat kabupaten yang melibatkan sebanyak 30 orang guru dan Kepala Sekolah. Untuk peningkatan pendidikan non formal juga telah dilaksanakan pemenuhan kebutuhan 10 unit Taman Bacaan Masyarakat, monitoring ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A, B

dan C dengan jumlah peserta mencapai 279 siswa. Demikian pula untuk pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis akreditasi pengelola PAUD sebanyak 24 lembaga PAUD, penyelenggaraan kreatifitas dan kompetensi peserta didik Taman Kanak Kanak sebanyak 100 orang. Melalui Dana Alokasi Khusus telah disalurkan bantuan operasional kepada 2 sekolah Taman Kanak-Kanak di Bintan Timur dan Bintan Utara, rehab bangunan TK dan lembaga PAUD, pembangunan 3 unit lembaga PAUD, pengadaan sarana dan prasarana alat permainan edukatif untuk 37 lembaga PAUD; penyelenggaraan lomba untuk peserta didik TK dan PAUD yang diikuti 500 peserta dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidik TK dan PAUD.

Keberhasilan dibidang pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya **Angka Rata-Rata Lama Sekolah** yang telah mencapai **8,36 tahun** pada tahun 2018; **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI** tahun 2018 mencapai **104,62 persen** dengan **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI** sebesar **99,69 persen** dan **APK SMP/MTs** mencapai **97,35 persen** dan **APM SMP/MTs 86,73 persen**. Keberhasilan di bidang pendidikan juga telah ditunjukkan dengan diraihnya beberapa penghargaan dan prestasi ditingkat Nasional maupun Propinsi pada tahun 2018 seperti : **Penghargaan Indeks Kelola Tahun 2018** dari Deputy Bidang Ekonomi Staff Kepresidenan karena keberhasilan Kabupaten Bintan dalam mengelola secara efektif APBD dan program kerja dalam bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bintan dinilai mampu meningkatkan kualitas **Angka Partisipasi Murni** dibandingkan daerah lainnya. **Angka Putus Sekolah** juga dinilai rendah, serta keberhasilan tersebut juga didukung dengan alokasi anggaran pendidikan telah mencapai sebesar **22 persen**, lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Selanjutnya sebagai dukungan nyata Kepala Daerah dalam bidang pendidikan yang telah menggesa beberapa program yang bermanfaat bagi masyarakat diantaranya Program Bantuan Perlengkapan Sekolah dan Transportasi bagi murid SD/SMP secara gratis, Program Mengaji Sebelum jam belajar di mulai, Pembersihan

Infrastruktur sarana prasarana belajar serta pengembangan teknologi informasi bidang Pendidikan telah membuahkan hasil berupa penghargaan **Penghargaan Ki Hajar Award Tahun 2018** dari **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pembangunan **Urusan Kesehatan**, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya **Angka Harapan Hidup (AHH)** dari sebesar **70,12 tahun** pada tahun 2017 meningkat menjadi **70,18 tahun** pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan indeks kesehatan, namun tampaknya masih diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian ibu dan bayi secara signifikan dapat terwujud dimasa mendatang.

Angka Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2018 dijumpai hanya 4 kasus saja. Angka ini relatif rendah dibanding target yang ditetapkan. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi yang menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas kesehatan khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah dilakukan melalui optimalisasi program-program yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. (1) Pengkajian seluruh kasus kematian maternal oleh Tim Audit Maternal Perinatal (AMP), (2) Kegiatan orientasi peningkatan skil/kompetensi bidan, (3) Supervisi fasilitatif Poliklinik Desa, serta (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K);

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi secara bertahap terus menjadi prioritas. Begitu pula dengan penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu terus dilaksanakan dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan. Sementara itu persentase Balita Gizi Buruk juga menunjukkan tren yg terus menurun setiap tahun. Penurunan ini disebabkan adanya intervensi Tim Asuhan Gizi di tingkat puskesmas

maupun rumah sakit. Indikator lain yang menaikkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan minimal lima jenis tenaga kesehatan seperti tenaga Farmasi, Analis Labor, Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di setiap puskesmas. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana Tahun 2018 telah mencapai delapan puskesmas. Sementara itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang melayani masyarakat menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2018 jumlah masyarakat yang terlayani meningkat sangat signifikan yaitu 15.500 jiwa atau 54,92 persen. Kunjungan peserta JKN ini tersebar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sementara itu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana ditunjukkan dengan cakupan peserta KB aktif yang mencapai 85,96 persen terhadap pasangan usia subur. Untuk keberhasilan program Keluarga Berencana dan menciptakan **Kampung Keluarga Berencana** ini Pemerintah Kabupaten Bintan bersama PKK Kabupaten Bintan telah meraih penghargaan **Manggala Karya Kencana** dari Pemerintah Pusat. Sementara itu Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga telah memberikan pula penghargaan **Kabupaten Sehat Tahun 2018** dan **Pastika Parama Tahun 2018**.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, **Urusan Ketenagakerjaan**, upaya yang dilaksanakan pada urusan bidang ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Bintan yang diwujudkan melalui program perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk memudahkan calon tenaga kerja baru dalam mencari informasi lapangan kerja telah dilaksanakan penyebaran informasi bursa tenaga kerja. Selain itu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran

telah dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja sarjana yang diikuti sebanyak 32 orang agar menjadi tenaga kerja yang terampil bersertifikasi serta kompeten. Upaya untuk peningkatan jaminan sosial tenaga kerja telah dilakukan koordinasi kebijakan pengupahan terkait dengan **Kebutuhan Hidup Layak** yang telah menyepakati dan menetapkan **Upah Minimum** Kabupaten Bintan tahun 2018 sebesar 3,11 juta rupiah lebih. Angka ini terus meningkat bila dibanding dari tahun sebelumnya yang secara langsung pula telah mempengaruhi peningkatan jumlah peserta program Jamsostek. Dilain pihak untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis juga telah dilaksanakan penyuluhan lembaga kerjasama **Bipartit**. Pada tahun 2018, jumlah kasus perselisihan tercatat sebanyak 5 kasus, yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 3 kasus dan 2 kasus diselesaikan dengan anjuran, sedangkan 1 kasus diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sedangkan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cenderung menurun tercatat hanya 4 kasus, dimana 2 kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama dan 2 kasus dengan anjuran dan hanya 1 kasus yang dilanjutkan ke PHI.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Kelima, Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat, menjadi prioritas urusan Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan sasaran (1) Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah, (2) Terwujudnya toleransi antar umat beragama dan (3) Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing.

Untuk **Urusan Kebudayaan**, sepanjang tahun 2018 ditandai dengan semaraknya berbagai aktifitas kebudayaan, sebagai cerminan dari cukup kondusifnya iklim kebebasan, kreatifitas maupun ruang publik untuk berekspresi seperti pelaksanaan pagelaran panggung seni dan budaya,

festival tari dan pentas rakyat yang menampilkan berbagai macam kesenian dan permainan rakyat yang ada di Kabupaten Bintan serta pelaksanaan pawai budaya. Selanjutnya, sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman telah dilaksanakan pengembangan nilai-nilai budaya dan seni yang menampilkan budaya Melayu maupun Nusantara. Demikian pula untuk melestarikan benda-benda bersejarah warisan budaya dilakukan pengembangan museum bahari. Untuk memelihara tatanan kehidupan beragama, baik dari aspek kerukunan hidup antar umat beragama maupun kualitas kehidupan beragama, hingga saat ini situasinya tetap kondusif serta terjaga dengan baik berkat keberadaan **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** Kabupaten Bintan.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Misi Keenam yaitu **Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan** yang diimplementasikan ke dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran (1) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak (2) Menurunnya persentase penduduk miskin (3) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan (5) Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa.

Berkenaan dengan **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, telah dilaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang melibatkan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Program ini telah meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender serta terimplementasikannya anggaran yang responsif gender disetiap OPD; Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam rangka

perlindungan perempuan korban *trafficking*, KDRT, pornografi, pelecehan seksual dan hak asuh anak; Pembinaan Organisasi Perempuan yang melibatkan 80 peserta dari organisasi perempuan di Kabupaten Bintan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penerapan pengarusutamaan gender, ditunjukkan dengan meningkatnya angka **Indeks Pembangunan Gender** yang mencapai 92,58 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kesetaraan gender di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bintan konsisten bekerja keras dan bersinergi bersama masyarakat secara optimal dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Bintan sehingga pada tahun 2018 untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Bintan berhasil meraih **Anugerah Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam **Urusan Sosial** pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 11.616 jiwa yang meliputi penanganan penyandang disabilitas, tuna susila, lanjut usia serta bekas narapidana. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan antara lain memberikan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 107 unit rumah, dengan Total Anggaran sebesar 2,74 milyar rupiah lebih terdiri dari 125 unit rumah dibiayai dengan APBD Kabupaten Bintan Tahun 2018. Untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan telah dilaksanakan pemberian bantuan permodalan kepada 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing mendapatkan 30 juta rupiah, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 4 KUBE masing-masing menerima 20 juta rupiah. Bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Tambelan, Gunung Kijang dan Teluk Bintan dan Seri Kuala Lobam yaitu 13 KUBE masing-masing menerima 20 juta rupiah. Disamping itu

dilaksanakan pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin melalui penyaluran bantuan dengan sumber Dana Dekonsentrasi bagi kepada 55 unit KUBE Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan, serta penyaluran bantuan UEP bagi fakir miskin dengan sumber dana APBD Propinsi Kepulauan Riau kepada 71 Kelompok Penerima Manfaat di wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir. Program Keluarga Harapan Perdesaan dan Perkotaan dengan total sebanyak 60 Kelompok Penerima Manfaat dengan bantuan masing-masing 2 juta rupiah; KUBE dekonsentrasi sebanyak 200 KPM dengan total bantuan sebesar 400 juta rupiah dan UEP sebanyak 400 KPM dengan total bantuan sebesar 800 juta yang bersumber dari Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Untuk mengoptimalkan program rehabilitasi sosial dan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat lansia telah dilaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia bekerjasama dengan Komisi Daerah Lanjut Usia berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian nutrisi dan souvenir kepada 1000 orang lansia di 7 kecamatan. Pada tahun 2018 juga melalui APBD telah disalurkan bantuan berupa pendampingan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 28 anak penyandang disabilitas berat. Dan dengan APBD Propinsi Kepulauan Riau juga telah disalurkan bantuan kepada 32 anak penyandang disabilitas berupa alat bantu sebanyak 10 unit. Melalui dana APBN dan APBD juga telah disalurkan kepada 40 UEP Lanjut Usia di tiga kecamatan masing-masing menerima bantuan 2 juta rupiah. Sosialisasi pencegahan penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA kepada 100 orang pelajar SMK. Sementara itu dukungan Pemerintah untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa telah dilakukan kerjasama penyembuhan dengan beberapa rumah sakit diluar Kabupaten Bintan, antara lain 6 orang ke RSJ Tampan Pekanbaru dan Panti Sosial di Bengkulu. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga ODGJ sebanyak 44 orang masing-masing menerima 1.300.000 rupiah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemberdayaan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan membina kerjasama dengan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Kabupaten Bintan melalui kegiatan bhakti sosial pemberian souvenir kepada 400 lansia, bantuan sembako kepada warga masyarakat kurang mampu sebanyak 1800 paket, alat bantu disabilitas kepada 173 orang, sarana dan prasarana kantor TAGANA dan LKS Kabupaten Bintan, Ekspo Bintan Sejahtera sebagai fasilitas pameran produksi ekonomi kerakyatan yang diikuti oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ada di Kabupaten Bintan, Bimtek untuk pengurus Karang Taruna yang diikuti oleh 50 peserta, bulan bhakti karang taruna yang berisi kegiatan penyaluran bantuan sosial. Untuk program perlindungan dan jaminan sosial telah dilaksanakan pemberian bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu di 10 kecamatan sebanyak 2000 paket, Program Keluarga Harapan dengan 3.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sosial non tunai kepada 8.809 RTSM senilai 4,17 milyar rupiah lebih.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa diantaranya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang direalisasikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa pemberian bantuan modal sebesar 50 juta rupiah untuk 34 unit BUMDes, dengan sumber dana APBN. Sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 34 unit BUMDes di seluruh Kabupaten Bintan dengan tingkat keaktifan mencapai 91 persen dan telah menghasilkan Pendapatan Desa sebanyak 23 unit. Oleh karena itu Pelatihan Manajemen BUMDes terus ditingkatkan dan pada tahun 2018 diikuti sebanyak 20 orang pengurus BUMDes. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa yang mengikutsertakan aparatur dari 36 desa.

Selaras dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai

ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga berkomitmen untuk melakukan pembinaan desa agar pemanfaatan dana desa menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018, APBD Desa yang dianggarkan oleh pemerintah mencapai 93,26 miliar rupiah lebih dengan rincian **Dana Desa dari Pemerintah Pusat** mencapai 30 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 27,58 milyar lebih atau 89 persen dan **Alokasi Dana Desa** dari Pemerintah Daerah mencapai 53 miliar rupiah lebih dengan realisasi mencapai 46 persen. Pada Tahun 2018 Propinsi Kepulauan Riau memberikan **apresiasi terhadap keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tahun 2017 dengan mendapat posisi terbaik ke 2 se-Kepulauan Riau**. demikian pula dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik, Kabupaten Bintan telah berhasil meraih predikat terbaik untuk tingkat Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat desa telah dilaksanakan pula beberapa kegiatan melalui program perencanaan pembangunan daerah bawahan antara lain sinkronisasi data profil desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral; Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Kerja keras yang terwujud antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Daerah Bawahan ini telah menghasilkan berbagai penghargaan antara lain **Penghargaan Desa dan Kelurahan Terbaik 2018 dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau**

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah dilaksanakan kegiatan **Gelar Teknologi Tepat**

Guna (TTG). Kegiatan ini juga merupakan upaya pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diikuti sebanyak 28 peserta yang diharapkan mampu bersaing di tingkat propinsi maupun nasional. Lomba desa dan kelurahan, operasional bakti pemberdayaan masyarakat dengan TNI AD dan pendampingan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Peserta Rapat Paripurna DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Misi Ketujuh, Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan yang diimplementasikan ke dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan pembinaan atlet dalam rangka meningkatkan prestasi serta mempersiapkan atlet untuk mengikuti pertandingan ditingkat propinsi maupun nasional yang telah menghasilkan 200 atlet dari berbagai cabang olah raga; Sementara itu untuk mengembangkan keperibadian untuk membentuk karakter tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual secara terintegrasi dan transedental telah dilaksanakan pelatihan ESQ yang diikuti sebanyak 70 orang pemuda dan mahasiswa.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Berkenaan dengan pelaksanaan misi yang terakhir yaitu **Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**, yang diimplementasikan di dalam Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup dengan sasaran (1) Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan, (2) Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas Peternak, (3) Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah, (4) Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya

meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dan (5) Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola.

Pembangunan **Urusan Pertanian** dilakukan dengan meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan dan hortikultura ramah lingkungan melalui kegiatan pengembangan areal produktif tanaman rempah dan penyegar, pemeliharaan kebun bibit perkebunan, pengendalian, pengawasan dan perlindungan tanaman perkebunan, pengembangan tanaman bawang merah dan peningkatan produk unggulan daerah yaitu tanaman salak sari intan dan hortikultura seperti jeruk kasturi, jeruk lemon, lengkung, sirsak dan jambu air madu. Pada tahun 2018 bibit tanaman salak Sari Intan dan bibit tanaman hortikultura lainnya yang dihasilkan di Kebun Bibit Pertanian Kabupaten adalah sebanyak 5.400 batang selanjutnya telah diserahkan kepada petani serta masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2018 pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa 1 unit traktor roda empat, 12 unit cultivator, rumah kompos pencacah pupuk organik, hidrotiller, mesin perontok padi masing-masing 1 unit, dan 28.936 kg pupuk untuk kelompok tani di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Sebong, Teluk Bintan dan Bintan Utara.

Upaya ini telah menghasilkan produksi tanaman sayuran pada tahun 2018 yang mencapai 16 ribu ton lebih dan produksi tanaman buah-buahan mencapai sebesar 12 ribu ton lebih. Walaupun capaian produksi komoditi ini sedikit mengalami penurunan bila dibanding dengan produksi pada tahun 2017 disebabkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi dan berdampak langsung pada hasil panen khususnya sayur mayur, namun hasil ini **telah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal**. Terkait dengan produksi komoditi unggulan perkebunan seperti Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh dan Lada produksinya ditahun 2018 mencapai 12 ribu ton lebih.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, upaya peningkatan produksi hasil peternakan telah dilakukan pengembangan ternak masyarakat kelompok tani di beberapa kecamatan seperti budidaya ternak unggas dan kambing; pelayanan kesehatan masyarakat **veteriner** melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adanya peningkatan Produksi Daging dan Telur sebesar **4.765 Ton** dari target yang telah ditetapkan. Selain itu dilaksanakan pula Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak di 10 Kecamatan sehingga sepanjang tahun 2018 Kabupaten Bintan masih dinyatakan sebagai daerah yang bebas dari beberapa penyakit **zoonosis** berbahaya seperti **rabies, antraks, flu babi, brucellosis, penyakit mulut dan kuku**.

Upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam merupakan hal yang penting dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di daerah. Secara berkala Pemerintah Kabupaten Bintan tetap terus melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Demikian pokok-pokok penyampaian kinerja Pemerintahan Daerah sebagai gambaran progres pengelolaan seluruh misi pembangunan. Kiranya berbagai substansi kinerja yang termuat secara utuh dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 akan menjadi **referensi objektif** bagi seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam menilai **efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang dilakukan sepanjang tahun 2018.

Keberhasilan, tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018 merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus kita selesaikan bersama dan merupakan **lesson learned** bagi berbagai pihak dalam menyongsong percepatan perwujudan **Bintan Gemilang 2025**. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai

kekurangan dalam penyampaian nota pertanggungjawaban ini. Kiranya hal tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua. **Insha Allah**, upaya membangun tata pemerintahan yang baik akan lebih cepat terlaksana jika kita semua senantiasa melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam mewujudkan berbagai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai sasarannya.

Saya percaya, seluruh anggota DPRD yang terhormat sama memiliki keinginan yang sejalan untuk terus mendorong tumbuhnya semangat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Manakala masih terdapat berbagai kekurang-efektifan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Daerah, marilah kita bangun terus kerjasama untuk saling memperbaikinya dengan tulus, proporsional serta memberi kesepadanan peran yang makin luas dari seluruh elemen masyarakat daerah dalam menyelesaikan agenda pembangunan Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang.

Demikian pemaparan umum kinerja Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018 yang disertai dengan gambaran mengenai berbagai hasil yang telah dicapai beserta problematika yang dihadapi. Semoga hal ini akan menjadi momentum bersama bagi penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah kedepan.

Sebelum saya akhiri penyampaian Nota Pengantar LKPJ ini terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapaikan pantun sebagai adat resam melayu sebagai berikut :

**PUTRI RAJE PERGI KE PEKAN
MEMBAWA KETUPAT UNTUK DIMAKAN
LKPJ SUDAH DISAMPAIKAN,
KIRANYA DAPAT DIPARIPURNAKAN**

**TERUNA BERDENDANG MENARI ZAPIN
NAIK PERAHU KE PULAU TELANG
TIGA TAHUN BERSELANG ASRI MEMIMPIN
MELANGKAH MENUJU BINTAN GEMILANG**

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI BINTAN,

Ttd

APRI SUJADI



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**